



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Ancaman Etnonasionalisme Terhadap Keamanan Nasional:  
Analisis Kasus Separatisme Catalunya**

Skripsi

Oleh

Dave Benaiah Richard Hilliard

2017330237

Bandung

2021



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Ancaman Etnonasionalisme Terhadap Keamanan Nasional:  
Analisis Kasus Separatisme Catalunya**

Skripsi

Oleh

Dave Benaiah Richard Hilliard  
2017330237

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dave Benaiah Richard Hilliard  
Nomor Pokok : 2017330237  
Judul : Ancaman Etnonasionalisme Terhadap Keamanan Nasional:  
Analisis Kasus Separatisme Catalunya

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 22 Juli 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Putu Agung Nara Indra, S.IP.,M.Sc.

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Mangadar Situmorang, Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dave Benaiah Richard Hilliard

NPM : 2017330237

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Ancaman Etnonasionalisme Terhadap Keamanan Nasional: Analisis Kasus Separatisme Catalunya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2021



Dave Benaiah Richard Hilliard

## ABSTRAK

Nama : Dave Benaiah Richard Hilliard

NPM : 2017330237

Judul : Ancaman Etnonasionalisme Terhadap Keamanan Nasional: Analisis Kasus Separatisme Catalunya

---

Terdapat perbedaan persepsi mengenai Identitas antara Catalunya dengan Spanyol yang memicu agenda separatisme. Konflik identitas terjadi disebabkan generalisasi identitas guna menciptakan sebuah identitas homogen dalam sebuah bentuk negara yang heterogen. Generalisasi tersebut kemudian memicu konflik antara kedua jenis identitas yaitu identitas etnis dan identitas kenegaraan. Konflik diawali melalui berkembangnya etnonasionalisme Catalunya yang termanifestasikan dalam sebuah pergerakan separatisme. Jumlah partisipasi masyarakat Catalan dalam pergerakan separatistis sudah mencapai jumlah yang sulit untuk dibendung oleh pemerintah pusat Spanyol. Eksistensi pergerakan politik yang dilandaskan etnonasionalisme Catalunya sangat mengancam kesatuan negara Spanyol. Separatisme Catalunya dianggap mengancam dikarenakan kemungkinan untuk meredefinisikan Spanyol secara keseluruhan, mulai dari pengurangan jumlah penduduk yang signifikan, struktur politik yang berubah total, hingga kehilangan sumber besar penghasilan negara. Dengan demikian Spanyol perlu segera untuk menangani ancaman yang disebabkan oleh konflik identitas ini. Ancaman etnonasionalisme Catalunya pada era modern ini dapat dikatakan sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keamanan Spanyol. Dengan demikian penulis akan menjelaskan bagaimana etnonasionalisme tersebut dikonstruksi dan diturunkan ke generasi dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Penulis juga akan melihat dari perspektif Spanyol dalam menangani tindak tanduk etnonasionalisme Catalunya sebagai sebuah ancaman kelompok sosial. Dalam menjabarkan pergerakan separatisme Catalunya, penulis akan menggunakan pendekatan etnonasionalisme untuk menjelaskan bagaimana identitas etnis Catalunya terpolarisasi dari identitas negara induk sehingga menimbulkan konflik. Untuk menjelaskan perspektif Spanyol dalam menghadapi etnonasionalisme sebagai ancaman akan digunakan definisi keamanan tradisional dan pendekatan sekuritisasi. Dengan pendekatan berikut penulis akan menjelaskan etnonasionalisme Catalunya yang digerakan menjadi sebuah ancaman eksternal Spanyol, membentuk sebuah kontestasi kepentingan di bidang politik antara dua identitas berbeda.

Kata Kunci: Catalunya, Separatisme, Etnonasionalisme, Ancaman, Sekuritisasi

## **ABSTRACT**

*Name : Dave Benaiah Richard Hilliard*

*NPM : 2017330237*

*Title : Threat of Ethnic Nationalism on National Security: The Case Study of Catalan Separatist Movement.*

---

*There is a difference in perception of Identity between Catalonia and Spain that fuels a separatism agenda. Identity conflicts occur due to generalization of identity in order to create a homogeneous identity in a heterogeneous form of state. The generalization then triggered a conflict between the two types of identities, namely ethnic identity and state identity. The conflict began with the development of Catalan ethno nationalism manifested in a separatism movement. The number of Catalans participating in the separatist movement has reached a difficult number to be stopped by Spain's central government. The existence of a political movement based on Catalan ethno nationalism threatens the unity of the Spanish state. Catalan separatism is considered threatening due to the possibility of redefining Spain as a whole, from a significant reduction in population, a completely changing political structure, to a loss of a large source of state income. Thus Spain needs to urgently address the threat caused by this identity conflict. The threat of Catalan ethno nationalism in the modern era is arguably one of the biggest threats to Spain's security. Thus the author will explain how ethno nationalism was constructed and passed down to generations and disseminated throughout society. The author will also look from a Spanish perspective in addressing catalan ethno nationalism as a threat to social groups. In describing the Catalan separatism movement, the author will use an ethno nationalism approach to explain how Catalonia's ethnic identity is polarized from the identity of the host country to cause conflict. To explain Spain's perspective in the face of ethno nationalism as a threat will be used traditional security definitions and securitization approaches. With the following approach the author will explain catalan ethnonationalism which is being moved into an external threat of Spain, forming a contest of interests in the field of politics between two distinct identities.*

*Keyword: Catalonia, Separatism, Ethno Nationalism, Threat, Securitization*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan mata kuliah skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penelitian ini mengkaji etnonasionalisme Catalunya yang menjadi landasan agenda separatis yang mengancam keamanan Spanyol. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru atau juga menjadi inspirasi untuk menyusun penelitian lainnya yang serupa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penulisan skripsi, utamanya kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Sukawarsini Djelantik, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

3. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D, sebagai dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk membagikan ilmu untuk memberikan masukan dan arahan bagi penulis dalam merangkai skripsi yang baik, dan menemani proses skripsi hingga sidang.
4. Keluarga inti, Ayah, Ibu, Adik, dan Nenek yang selalu bersedia memberikan doa, semangat dan dukungan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Keluarga Besar, yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penulisan nas
6. Sahabat SMA yang tidak segan-segan memberikan dorongan, semangat, bahkan saran dalam penulisan skripsi.
7. Sahabat kuliah dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, yang sudah memberikan ilmu, bantuan, hingga dorongan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi.
8. Sahabat kuliah yang diluar program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, yang memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2017 yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi.
10. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang sudah berkontribusi untuk membantu dan memotivasi penulis dalam meragkai naskah skripsi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, penulis hendak memohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dalam penelitian ini. Terlebih lagi, kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan oleh penulis demi menyediakan penelitian yang lebih berguna.

Bandung, 11 Juli 2021

Dave Benaiah Richard Hilliard

## DAFTAR ISI

<i>ABSTRAK</i> .....	<i>i</i>
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>ii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i> .....	<i>iii</i>
<i>DAFTAR AKRONIM</i> .....	<i>viii</i>
<i>BAB I</i> .....	<i>1</i>
<i>PENDAHULUAN</i> .....	<i>2</i>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	<i>2</i>
1.2 Identifikasi Masalah .....	<i>4</i>
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	<i>4</i>
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	<i>13</i>
1.2.3 Pertanyaan Penelitian .....	<i>13</i>
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<i>13</i>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	<i>13</i>
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	<i>14</i>
1.4 Kajian Literatur .....	<i>14</i>
1.5 Kerangka Pemikiran .....	<i>19</i>
1.6 Metode Penelitian .....	<i>33</i>
1.6.1 Metode Penelitian.....	<i>33</i>
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	<i>33</i>
1.7 Sistematika Pembahasan .....	<i>34</i>
<i>BAB II</i> .....	<i>36</i>
<i>PERKEMBANGAN NASIONALISME ETNIS CATALUNYA</i> .....	<i>36</i>
2.1 Analisis Sejarah Terbentuknya Catalanisme .....	<i>38</i>
2.1.1 Dinamika Otonomi di Abad Pertengahan.....	<i>38</i>
2.1.2 <i>Renaixença</i> Sebagai akar Nasionalisme Catalunya .....	<i>42</i>
2.1.3. Francisco Franco dan Catalanisme .....	<i>50</i>
2.2 Marginalisasi Ekonomi di Era Kebangkitan Demokrasi Spanyol.....	<i>59</i>
<i>BAB III</i> .....	<i>69</i>

<b><i>KONTESTASI ANTARA PERGERAKAN IDENTITAS ETNIS CATALUNYA DAN SEKURITISASI SPANYOL.....</i></b>	<b><i>69</i></b>
<b><i>3.1 Etnonasionalisme Sebagai Katalis Konflik Identitas .....</i></b>	<b><i>70</i></b>
<b><i>3.1.1 Simbolisasi Etnis dalam Pembentukan Identitas .....</i></b>	<b><i>74</i></b>
<b><i>3.1.2 Narasi Populisme Dalam Mobilisasi Menuju Separatisme .....</i></b>	<b><i>77</i></b>
<b><i>3.1.3 Perbedaan Antara Narasi Kemerdekaan Dengan Fakta .....</i></b>	<b><i>84</i></b>
<b><i>3.2 Perspektif Spanyol Dalam Menghadapi Separatisme Catalunya .....</i></b>	<b><i>87</i></b>
<b><i>3.2.1 Separatisme Catalunya Sebagai Ancaman Negara .....</i></b>	<b><i>91</i></b>
<b><i>3.2.2 Implementasi Sekuritisasi Dalam Menghadapi Separatisme Sebagai Ancaman .....</i></b>	<b><i>97</i></b>
<b><i>BAB IV.....</i></b>	<b><i>102</i></b>
<b><i>KESIMPULAN .....</i></b>	<b><i>102</i></b>
<b><i>DAFTAR PUSTAKA.....</i></b>	<b><i>105</i></b>

## **DAFTAR AKRONIM**

CiU = *Convergencia I Unio*

ERC = *Esquerra Republicana de Catalunya*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu landasan utama dari berdirinya sebuah negara adalah pengakuan kebangsaan oleh warga negara, berbeda dengan komponen geografis yang dimana dapat dibagi kedalam batasan-batasan nyata yang disepakati secara internasional. Kesadaran ketergolongan warga negara dalam negara sebagai komunitas besar disebut identitas nasional. Identitas tersebut terhubung melalui ikatan psikologis dan pemahaman kognitif individu.

Kesadaran psikologis individu cenderung bersifat semu yang dimana semua didasari oleh asumsi keseragaman ideologi dan perilaku atau homogenitas dalam suatu komunitas. Kesadaran psikologis tersebut menciptakan "batasan-batasan" imajiner sebagai fungsi pembeda antara identitas suatu daerah dengan identitas lainnya. Selain melalui penanaman psikologis, perbedaan identitas juga terbentuk melalui aspek kognitif yang didapat melalui sumber informasi berupa pemahaman lingual dan juga pemahaman historis, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan identitas.

Identitas adalah kumpulan agregat beragam individu dalam suatu daerah, dalam menginterpretasi sebuah kecenderungan sosial yang terjadi dalam komunitas dimana

dirinya berada. Pemahaman mengenai kecenderungan sosial tersebut kemudian menjadi landasan bagaimana individu tersebut bertindak dan juga bagaimana komunitas tersebut tercermin dari perilaku individu tersebut. Dalam konsep sosiologi kenegaraan dikenal gagasan “*imagined communities*” oleh Benedict Anderson, yang mengatakan bahwa kesadaran individu terhadap identitas negara ditikberatkan dalam pembentukan sebuah khayalan non-tangibel dalam berbagai aspek: sejarah negara tersebut, dan juga kecenderungan perspektif, pola pikir, pola tindakan antara anggota negara tersebut <sup>1</sup>.

Akan tetapi dalam pertumbuhannya, terdapat fenomena segmentasi dalam konstruksi identitas yang terjadi di suatu negara, tidak semua warga negara di suatu negara memiliki pertumbuhan dan persepsi identitas yang sama, hal ini tidak lain disebabkan oleh pertumbuhan sifat dasar sosio-kultural yang heterogen dalam suatu lingkup geografis yang kemudian diseragamkan guna menciptakan identitas homogen sebagai kesatuan negara. Mobilisasi kelompok melalui instrumentasi identitas ini berpotensi untuk mengancam keamanan dan kesatuan negara melalui subversi yang mengarah kepada pemisahan diri.

Karakteristik kelompok tersebut dapat menjadi ancaman bagi kemandirian suatu negara, dikarenakan perilaku kelompok identitas berpotensi menyebabkan distorsi pada sentralisasi pemerintahan dan menciptakan disintegrasi. Proses mencapai agenda

---

<sup>1</sup> George M. Wilson and Benedict Anderson, “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,” *The American Historical Review* 90, no. 4 (1985): p. 903, <https://doi.org/10.2307/1858850>.

disintegrasi tersebut seringkali menjadi katalis revolusi yang diwarnai dengan populisme unilateral dan anarkisme. Segmentasi identitas dan ideologi tersebut merupakan ancaman bagi individu maupun keutuhan institusi negara. Dalam konteks ini akan mengkaji adanya segmentasi pertumbuhan persepsi identitas masyarakat Catalunya dengan identitas Spanyol sebagai sebuah negara yang menimbulkan tuntutan pemisahan diri.

Munculnya kebanggaan dan primordialisme para Catalan yang membangkang dari pemerintahan pusat Spanyol, dan dogmatisme masyarakat Catalan untuk memisahkan diri tentunya berpotensi untuk memberikan distorsi pada sistem pemerintahan dan juga kondisi sosio-ekonomi Spanyol secara keseluruhan. Separatisme modern ini cepat atau lambat akan dipersepsikan sebagai ancaman kepada kedaulatan negara, yang kemudian memaksa pemerintah domestik untuk mengalihkan pandangan kepada masalah tersebut.

Dengan dianggapnya separatisme Catalunya sebagai kategori baru dalam klasifikasi ancaman dalam negeri, para pemerintah dan pembuat keputusan dituntut untuk memodifikasi konsep keamanan nasional yang baru. Pergeseran sosio-kultural tentunya menimbulkan karakteristik baru dalam ancaman domestik dan internasional yang akan dihadapi negara. Adaptasi adalah hal yang sangat krusial untuk pemerintah untuk memenuhi fungsi fundamental-nya yaitu melindungi keamanan setiap warga negara.

Segmentasi pembentukan identitas masyarakat Catalunya dengan Spanyol pusat menciptakan sebuah fenomena nasionalisme dan primordialisme yang berujung pada pembentukan etnonasionalisme masyarakat Catalunya, yang menciptakan kondisi konfliktual antara negara pusat dengan suatu kelompok sosial. Kemunculan etnonasionalisme tidak asing untuk berlabuh pada kondisi konfliktual yang didorong oleh ideologi radikal, doktrinasi, agitasi, dan tindak unilateralisme politik suatu kelompok. Fenomena ini sangat mungkin untuk bereskalasi ke tahap berikutnya yaitu pemisahan diri dan berpotensi mengancam integrasi dan keamanan negara.

Dengan demikian mengantisipasi sebuah disintegrasi dapat dilakukan melalui memperlakukan mobilisasi etnonasionalisme Catalunya sebagai ancaman eksternal yang dipicu oleh kepentingan identitas. Dalam karya ilmiah ini penulis akan mengkaji bagaimana terbentuknya kohesivitas identitas masyarakat Catalunya sebagai objek kajian untuk menjelaskan bagaimana etnonasionalisme menciptakan kasus pemisahan diri yang mengancam kewanitaan nasional suatu negara di era modern.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Ketegangan antara pemerintah pusat Madrid dengan pergerakan nasionalisme Catalunya telah mewarnai polemik di pemerintahan Spanyol. Keberadaan partai pro-kemerdekaan Catalunya telah dianggap sebagai ancaman bagi persatuan negara oleh pemerintah pusat, dan warga negara Spanyol ter-polarisasi menjadi dua kubu yang

berbeda, yang kemudian memicu dilaksanakannya demonstrasi oleh para nasionalis Catalunya untuk mempromosikan kemerdekaan daerah otonom tersebut. Fragmentasi negara yang dipisahkan oleh identitas berpotensi berlabuh pada perpecahan politik, yang memaksa menghasilkan tahanan politik dan juga perpecahan diantara warga negara. Referendum Catalunya pada tahun 2017 yang tidak disambut baik oleh pemerintah memaksa para partai pro kemerdekaan untuk membangkan dan mengkonspirasikan demonstrasi yang berujung anarkis.

Tidak hanya berdampak pada pemerintahan domestik, akan tetapi kasus separatisme di Catalunya juga dilihat melalui perspektif ancaman bagi tatanan internasional, yaitu sebagai salah satu gejala awal merenggangnya Uni-Eropa selain kasus di Britania Raya, yaitu merenggangnya hubungan domestik dengan Irlandia dan dalam cakupan regional melalui peristiwa "*Brexit*".

Munculnya keinginan warga Catalunya untuk menjadi sebuah negara sendiri merupakan sebab dari munculnya nasionalisme yang berpusat dari kebanggaan sosio-kultural yang memicu Catalunya untuk memperjuangkan identitas mikronya untuk disandingkan dengan identitas mikro sebuah negara kesatuan. Stigma mengenai terjadinya marginalisasi dari para Spanyol kepada Catalunya juga berperan dalam mengagitasi pergerakan politik identitas ini, melalui pandangan idealis dan pragmatis dari warga Catalunya terhadap masalah ekonomi dan politik domestik Spanyol.

Terpisahnya akar sejarah dan kultural dalam presepsi identitas Catalunya menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk merasa ter-segmentasi dari pusat

pemerintahan, yang kemudian menimbulkan rasa bangga terhadap pencapaian historis dan juga kebudayaan para Catalan. Pergerakan nasionalis untuk memisahkan diri dapat dikatakan dimulai dari sebuah institusi politik yang mewakili sebuah identitas, yaitu munculnya partai radikal kiri yang mengedepankan agenda pemisahan diri dan autonomi di kursi parlementer. Nasionalisme warga Catalunya atau yang dikenal dengan sebutan "*Catalnisme*" tersebar di kursi parlementer dimana pasca pemilihan daerah di 2015, 72 dari 135 kursi parlemen dikuasai partai radikal kiri pro-kemerdekaan Catalunya dan hampir mengungguli persebaran partai yang memperjuangkan unifikasi Spanyol<sup>2</sup>.

Pendekatan populisme partai pro kemerdekaan mengkatalis pertumbuhan representasi warga negara yang mewakili agenda pemisahan diri, yang sebelumnya merasa puas dengan *status quo* otonomi daerah, perlahan bergerak untuk memisahkan diri. Nasionalisme tersebut dipicu oleh keputusan pembagian otonomi daerah melalui statuta otonomi Andalusia atau yang dinamakan "*Estatuto de Carmona*" yang merupakan hasil dari konstitusi Spanyol tahun 1978 sebagai tanda reformasi demokrasi<sup>3</sup>. Kebijakan otonomi Spanyol dipandang masih kurang mengakomodasi representasi kepentingan Catalunya dalam kebijakan negara, sehingga ketidakpuasan tersebut membentuk stigma marginalisasi.

---

<sup>2</sup> Nina Caspersen et al., "The Catalan Independence Referendum: An Assessment of the Process of Selfdetermination," *Report of the International Group of Experts* 1 (2017): pp. 1-93, 5.

<sup>3</sup> Ibid.

Stigma tersebut tersebut menjadi pemantik dari terciptanya perilaku separatis warga Catalan, dipicu oleh asumsi warga Catalan yang beranggapan bahwa Catalunya masih belum mengalami kemerdekaan secara penuh sehingga timbul perasaan penyalahgunaan Catalunya sebagai daerah otonomi. Ketegangan pemerintahan pusat dengan pemerintah Catalunya mencapai titik eskalasi pada Oktober 2017 dimana pemerintahan para partai pro kemerdekaan merepresentasikan *Generalitat* Catalunya mendeklarasikan kemerdekaan melalui referendum sekaligus dengan menjadikan Charles Puigdemont sebagai pemimpin.

Referendum segera ditolak dan dianggap sebagai aksi terlarang, dikarenakan pemerintah pusat melihatnya sebagai ancaman bagi kesatuan negara Spanyol yang berpotensi untuk menyebarkan anarkisme di berbagai daerah. Pemerintah pusat melakukan langkah gertakan melalui ancaman untuk mengaplikasikan Artikel 155 dalam konstitusi Spanyol, yaitu gerakan pengecualian untuk mencabut total hak otonomi daerah sebagai sanksi bagi Catalunya dalam aksi yang dianggap sebagai perlawanan terhadap negara<sup>4</sup>.

Untuk mengkaji lebih lanjut dalam konstruksi nasionalisme tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek diantaranya adalah: Historis, Ekonomi, dan Politik. Aspek historis yang menjelaskan konstruksi nasionalisme para Catalan telah tertanam sejak awal terbentuknya federasi kerajaan yang dimana didasarkan dari perbedaan gaya

---

<sup>4</sup> Christos Anastasios Tzagkas, "The Internal Conflict in Spain: The Case of Catalonia," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Sciences* 1, no. 8 (2018): pp. 58-61, 60.

pemerintahan dan juga budaya. Untuk meneliti awal dari terpisahnya identitas antara Spanyol dan Catalunya, perlu dilihat melalui sejarah di abad ke sembilan dimana terdapat dua kerajaan yang berkuasa di dataran Iberia yaitu kerajaan Kastila dan kerajaan Aragon, dimana keduanya disatukan melalui pernikahan politik dan kemudian terbentuk federasi dan merupakan bentuk awal dari negara kesatuan Spanyol<sup>5</sup>.

Di awal berjalannya federasi Spanyol, kedua kerajaan masih memiliki kedaulatan yang mutlak dan kedua kerajaan dilimpahkan untuk menjalankan otonomi pemerintahan sendiri. Pada awal abad ke-17, warga Catalunya menganggap mereka sebagai representasi kerajaan Aragon, merasa bahwa otonomi mereka terganggu dikarenakan rencana sentralisasi pemerintahan, yang kemudian berujung pada konflik yang mengancam kesatuan nasional yaitu perang saudara<sup>6</sup>.

Hal lain yang memisahkan Catalunya dengan Spanyol pusat adalah era perkembangan sosio-kultural yang pesat dan penyebaran bahasa Catalan yang sangat signifikan ditengah kejayaan Spanyol Kastilla yang melarang hal-hal yang dapat memicu separasi identitas Catalan yang kedua kalinya. Fenomena tersebut dinamakan era *Renaixença* yang dianggap sebagai era reformasi Catalan untuk melawan konsep sentralisasi identitas Kastilla<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Christos Anastasios Tzagkas, "The Internal Conflict in Spain: The Case of Catalonia," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Sciences* 1, no. 8 (2018): pp. 58-61, 59.

<sup>6</sup> Ibid..

<sup>7</sup> Antoni Santisteban Fernández, "Teaching the History of Catalonia: Past, Present and 'Futures'," *History Education Research Journal* 11, no. 2 (January 2013): pp. 34-44, <https://doi.org/10.18546/herj.11.2.04>, 34.

Pada abad ke 19, operasi kultural dan bahasa pada masa pemerintahan fasisme Francisco Franco di awal abad ke-20 kembali memukul warga Catalunya. Genosida besar terjadi terhadap masyarakat Catalan, yang Franco sebut sebagai eradikasi “penyakit” bagi eksistensi kedaulayan pemerintahan Spanyol. Berakhirnya pemerintahan Franco yang menandakan reformasi demokrasi Spanyol memicu nasionalisme dan persebaran bahasa Catalan berkembang sangat pesat, yang dicerminkan dari statistik bahasa Catalan mendominasi 60 % lebih banyak digunakan di Catalunya dibanding Spanyol<sup>8</sup>.

Hal ini didukung pula dengan pembentukan kembali pemerintahan Spanyol yang berusaha menerapkan kembali demokrasi melalui konstitusi Spanyol di tahun 1978 yaitu ‘*Estatuto de Carmona*’, yang dimana bahasan utama adalah pemberian hak otonomi kepada kelompok identitas di Spanyol salah satunya adalah Catalunya<sup>9</sup>.

Aspek ekonomi, tidak lain adalah dilandaskan oleh preferensi dan pragmatism ekonomi, yang dimana Catalunya merupakan daerah bagian Spanyol dengan tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang sangat tinggi, dimana Catalunya (melalui figur tahun 2012) menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih hebat dari negara anggota Uni-Eropa seperti Finlandia, Denmark dan bahkan mampu bersaing dengan Britania Raya<sup>10</sup>. Dengan demikian warga Catalan lebih mempercayai

---

<sup>8</sup> Christopher J. Borgen, “From Kosovo to Catalonia: Separatism and Integration in Europe,” *Goettingen Journal of International Law* 2 (2010): pp. 997-1033, 1017-1018.

<sup>9</sup> Nina Caspersen et al., “The Catalan Independence Referendum: An Assessment of the Process of Selfdetermination,” *Report of the International Group of Experts 1* (2017): pp. 1-93, 8.

<sup>10</sup> O. Amat et al., “The Economy of Catalonia,” *The Economy of Catalonia* § (n.d.), pp. 1-240, 15-18.

pemerintah otonomi Catalunya dibandingkan dengan pemerintah pusat, serta munculnya anggapan sektor industri dan pariwisata Catalunya merasa dibeatkan sebagai sektor utama pendapatan total Spanyol yang dianggap penuh dengan skandal dan korupsi dalam pendistribusiannya, dari krisis ekonomi 2006 hingga sekarang <sup>11</sup>.

Para Catalan juga memiliki argumentasi bahwa pemerintah pusat melakukan marjinalisasi ekonomi Catalunya melalui salah satu tuduhan mengenai penjarahan fiskal, yang berargumen bahwa Spanyol memberlakukan pajak yang eksploitatif dan tidak selaras dengan alokasi anggaran daerah. Salah satu desakan Catalunya untuk segera merdeka adalah idealisme kesejahteraan dan stabilitas ekonomi daerah tersebut yang dianggap dapat tercapai melalui pemisahan diri dari pemerintah Spanyol. Dianggap dengan berpisahnya Catalunya dari Spanyol, keterpurukan ekonomi paska krisis Uni-Eropa dianggap dapat lebih mudah diselesaikan jika Catalunya menjadi negara mandiri.

Aspek Politik, adalah perasaan akan tertundanya referendum yang telah terjadi bertahun-tahun, serta kegagalan Spanyol dalam mengimplementasikan demokrasi paska fasisme didukung dengan keputusan konstitusi Spanyol 1978 untuk otonomi daerah, yang mengikiskan rasa kesatuan sebagai warga negara Spanyol <sup>12</sup>. Sejak awal konstitusi 1978, pemerintah Catalunya sudah melakukan preparasi untuk menuju pada

---

<sup>11</sup> Nina Caspersen et al., "The Catalan Independence Referendum: An Assessment of the Process of Selfdetermination," *Report of the International Group of Experts 1* (2017): pp. 1-93, 15.

<sup>12</sup> Antoni Santisteban Fernández, "Teaching the History of Catalonia: Past, Present and 'Futures'," *History Education Research Journal* 11, no. 2 (January 2013): pp. 34-44, <https://doi.org/10.18546/herj.11.2.04>, 35.

kemerdekaan, diawali dari banyaknya ideologi pro-kemerdekaan di kursi parlementer, serta juga menguatkan identitas bahasa dan kebudayaan melalui intervensi ke kurikulum pendidikan yang dimana memperkenalkan bahasa Catalan sebagai media perkembangan kognitif. Implementasi bahasa tersebut menjadikan Catalunya sebagai satu-satunya daerah otonomi yang kurikulum pendidikannya dilaksanakan dalam dua bahasa yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Catalan<sup>13</sup>.

Orkestrasi masyarakat untuk membangkitkan keinginan memisahkan diri juga di orkestrasi oleh partai politik pro-kemerdekaan, beberapa partai tersebut adalah *Catalan European Democratic Party* dan *Catalan Republican Left*, yang dimana paska kejadian referendum 2017 yang sangat ditentang keras oleh pemerintah pusat dan diresmikan sebagai bentuk ancaman, kedua partai mendapat penekanan dari pemerintah, konflik ideologi tersebut kemudian melahirkan kriminalisasi anggota partai pro kemerdekaan dan melahirkan tahanan politik<sup>14</sup>.

Ketegangan antara pemerintah Spanyol dengan Catalunya di kursi parlemen belum mencapai sebuah kesepakatan, terbukti dengan jumlah para pemimpin Catalan yang memegang erat pro-kemerdekaan dan ber-ideologi *Catalanism* masih kurang untuk mencapai kemerdekaan Catalunya, dikarenakan distribusi suara yang imbang

---

<sup>13</sup> Christos Anastasios Tzagkas, "The Internal Conflict in Spain: The Case of Catalonia," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Sciences* 1, no. 8 (2018): pp. 58-61, 61.

<sup>14</sup> Ibid.

antara pro-kemerdekaan dan pro-kesatuan Spanyol baik dalam kursi politik hingga warga negara <sup>15</sup>.

Kondisi tersebut menimbulkan kesepakatan tersebut berada di ambang ambiguitas dan masih dalam kondisi *deadlock*, kondisi tersebut berpotensi menjadi akar dari timbulnya suatu ancaman bagi keamanan domestik Spanyol, dikarenakan semakin lama situasi mengambang, pertumbuhan nasionalisme akan berkembang dan tersebar semakin pesat, menimbulkan perilaku revolusioner dan mengkatalis separatisme untuk mencapai pemisahan diri melalui metode anarkis.

Tidak menutup kemungkinan akan berujung pada aksi militan, seperti kejadian sejarah separatisme Spanyol sebelumnya yaitu melalui kejadian separatisme Basque melalui kelompok ETA <sup>16</sup>. Penekanan dari pemerintah pusat akan dilaksanakannya referendum, dengan ancaman hukuman penjara kepada parlemen yang mempromosikan agenda pro-kemerdekaan, akan memperkuat dorongan untuk mencapai kemerdekaan sesegera mungkin dan menimbulkan perilaku penolakan dari warga negara kepada sentralisasi pemerintahan Madrid <sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Christos Anastasios Tzagkas, "The Internal Conflict in Spain: The Case of Catalonia," *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Sciences* 1, no. 8 (2018): pp. 58-61, 61.

<sup>16</sup> Antoni Santisteban Fernández, "Teaching the History of Catalonia: Past, Present and 'Futures'," *History Education Research Journal* 11, no. 2 (January 2013): pp. 34-44, <https://doi.org/10.18546/herj.11.2.04>, 35.

<sup>17</sup> *Ibid.*

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Guna menciptakan hasil karya ilmiah yang mengerucut dan terperinci, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan jangka waktu yang spesifik. Penulis akan mengambil data peristiwa pembentukan etno-nasionalisme Catalunya serta manifestasi ancumannya yang terjadi di era modern. Lebih spesifik penulis membatasi jangkauan penelitian perkembangan nasionalisme Catalunya hingga pada batas akhir yaitu referendum tahun 2017.

### **1.2.3 Pertanyaan Penelitian**

Melalui latar belakang masalah yang sudah disertakan, ditentukan suatu landasan pertanyaan untuk kegunaan spesifikasi penelitian. Rumusan masalah yang akan menjadi landasan karya ilmiah ini adalah *“Bagaimana Etnonasionalisme Catalunya membentuk sebuah agenda pemisahan diri yang mengancam bagi kestabilan Spanyol”*.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah, mengkaji fenomena pergerakan separatis yang digerakan oleh sebuah politisasi etnisitas dalam mencapai kepentingan kelompok. Penulis bertujuan untuk menjelaskan bahaya identitas etnis yang diinstrumentasi untuk mengancam kesatuan negara di era moderen. Dalam keberlangsungan penelitian, objek penelitian akan difokuskan pada Gerakan separatis

Catalunya, dikarenakan keunikan dari karakteristik separatisme bangsa Catalunya yang sangat melandaskan gerakannya pada perjuangan aktualisasi kelompok etnis untuk mencapai suatu kepentingan

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat, untuk menjadi kontribusi kepada perkembangan teori dan kaidah ilmu hubungan internasional, khususnya dalam sumbangsih penelitian cerminan latar sosiologis dalam manifestasi relasi hubungan internasional. Untuk mencapai manfaat tersebut akan dilaksanakan analisis pergerakan politik yang digerakan oleh populisme identitas sosial melalui pendekatan etnonasionalisme, sebagai salah satu ancaman internasional kontemporer yang memerlukan pendekatan proteksi khusus untuk dipertimbangkan dalam perumusan keputusan negara.

## **1.4 Kajian Literatur**

Untuk mengkaji masalah masalah lebih dalam dan menyajikan karya tulis yang objektif, penulis akan menyertakan beberapa pendapat ahli dalam menjelaskan konstruksi dan diferensiasi identitas atau politisasi pemerintah melalui identitas etnis yang menciptakan suatu pemikiran etnonasionalisme yang berdampak mengancam keamanan nasional.

Montserrat Guibernau dalam karya tulisnya yang berjudul *Nationalism and Intellectuals in Nations without States: The Catalan Case* mengatakan bahwa

fenomena separatisme Catalunya adalah salah satu bentuk pergerakan nasionalisme yang merambah bentuk menjadi bangsa tanpa negara<sup>18</sup>. Mobilisasi tersebut diawali pada kalangan intelektual, sebagai kaum pertama yang memiliki akses pengetahuan mengenai kondisi sejarah, politik, dan ekonomi sebuah kelompok identitas<sup>19</sup>. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pergerakan nasionalisme Catalunya diakui sebagai pergerakan yang diawali dari atas ke bawah, dari pergerakan elit hingga ke *grass root* di kalangan masyarakat<sup>20</sup>.

Guibernau juga menambahkan bahwa alam dari sebuah pergerakan nasionalisme tidak pernah logis<sup>21</sup>. Demikian pergerakan nasionalisme Catalunya dilihat sebagai bentuk pemikiran romantisme antara sebuah kelompok dengan identitas nenek moyang, dan sangat bertolak belakang dengan konsep rasionalitas<sup>22</sup>. Romantisme tersebut kemudian membentuk sebuah keinginan individu, yang didasarkan sebuah keputusan egois dan unilateral yang kemudian digerakan menjadi sebuah pergerakan sosial melalui orkestrasi dan agitasi<sup>23</sup>.

Guibernau menyebut fenomena Catalunya sebagai pemberontakan *sub-state*, dan sebuah pemberontakan *sub-state* dapat tercapai jika identitas *sub-state* tersebut memiliki sebuah institusi nyata yang dapat digunakan sebagai instrumen politik, entah

---

<sup>18</sup> Montserrat Guibernau, "Nationalism and Intellectuals in Nations Without States," The Institute of Political and Social Sciences Working Papers 222 (2003): pp. 1-30, 26.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

dalam bentuk perwakilan rakyat ataupun melalui media. Institusi tersebut juga harus memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga mampu menciptakan suatu tujuan untuk merubah *status quo*. Melalui penelitiannya pada kasus Catalunya, Guibernau menyimpulkan bahwa sebuah pemberontakan nasionalisme akan selalu bersifat subversif pada tatanan negara, dikarenakan alamnya yang bertujuan merombak *status quo*.

Josep R. Llobera memiliki pendapat yang berbanding terbalik dari Guibernau, dalam karya tulis *Aspects of Catalan Kinship, Identity, and Nationalism* mengatakan bahwa nasionalisme Catalan tidak terbentuk dari elit, melainkan dari masyarakat itu sendiri<sup>24</sup>. Keputusan politik untuk memisahkan diri adalah titik ekuilibrium antara keinginan rakyat dan keinginan elit. Pemisahan diri merupakan *common interest* masyarakat Catalan untuk mengekspresikan dan mempreservasi identitasnya<sup>25</sup>.

Llobera memasukan definisi *pairalisme* dalam analisisnya mengenai kasus pergerakan nasionalisme Catalunya. *Pairalisme* dijelaskan sebagai bentuk itikad baik masyarakat sekarang pada eksistensi identitas nenek moyang<sup>26</sup>. *Pairalisme* tersebut kemudian yang membentuk sebuah jiwa zaman untuk menyeragamkan identitas suatu daerah dengan identitas komunitas sebelumnya, kesamaan tersebut meliputi bahasa, budaya, hingga agama<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Josep R. Llobera, "Aspects of Catalan Kinship, Identity, and Nationalism," JASO 23, no. 3 (1997): pp. 297-309, 13.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

Llobera menekankan bahwa *pairalisme* Catalunya tidak dilandaskan oleh kondisi sosial yang sepenuhnya homogen, akan tetapi *pairalisme* tersebut tertanam menjadi sebuah kondisi umum yang membentuk kondisi keseragaman imajiner<sup>28</sup>. Hal ini dibuktikan melalui fenomena imigrasi yang sering terjadi di Catalunya pada masa ekspansi ekonomi Franco, akan tetapi Nasionalisme masih dimiliki oleh mayoritas masyarakat. Kesimpulan dari pendapat Llobera mengenai nasionalisme Catalunya adalah sebuah fenomena politik nativisme yang terbentuk bukan murni karena relasi langsung dengan nenek moyang, melainkan sebuah apresiasi terhadap komunitas sebelumnya yang tercermin dalam jiwa zaman Catalunya.

Brandon M. Boylan memiliki perspektif yang lain mengenai nasionalisme, dimana diskusi separatisme Catalunya sudah tidak lagi mengenai kontestasi identitas melainkan sebuah idealisme ekonomi. Melalui karya tulis *In Pursuit of Independence: The Political Economy of Catalonia's Secessionist Movement*, menjelaskan bahwa keinginan Catalunya untuk memisahkan diri tidak lain disebabkan oleh kondisi resesi yang memukul keseluruhan Spanyol<sup>29</sup>. Resesi tersebut terjadi di seluruh daerah Spanyol, akan tetapi kondisi tersebut dilihat melalui lensa diskriminasi kultural sehingga menciptakan persepsi bahwa Catalunya mengalami marginalisasi<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Josep R. Llobera, "Aspects of Catalan Kinship, Identity, and Nationalism," *JASO* 23, no. 3 (1997): pp. 297-309, 13.

<sup>29</sup> Brandon M. Boylan, "In Pursuit of Independence: the Political Economy of Catalonia's Secessionist Movement," *Nations and Nationalism* 21, no. 4 (2015): pp. 761-785, <https://doi.org/10.1111/nana.12121>, 779.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Boylan menjelaskan bahwa resesi tidak hanya mengagitasi Catalunya, akan tetapi beberapa daerah otonomi lainnya juga merasa termarginalisasi, salah satunya adalah kawasan Basque. Demikian Boylan berargumen bahwa kondisi pemisahan diri Catalunya merupakan sebuah kondisi yang sangat mengancam, karena keberhasilan Catalunya untuk berpisah akan menginspirasi daerah otonomi lain untuk menuntut pemisahan diri juga <sup>31</sup>.

Dalam diskusi ekonomi, terdapat pendapat lain mengenai kondisi ekonomi yang melatarbelakangi justifikasi Catalunya untuk membentuk agenda separatisme. Ruth Elisa Roller memoerkenalkan elemen globalisasi dan regionalisme dalam diskusi justifikasi separatisme Catalunya melalui karya tulis *Catalonia and European Integration: A Regionalist Strategy for Nationalist Objectives*. Roller mengatakan bahwa nasionalisme Catalunya adalah salah satu sebab dari kegagalan Spanyol untuk mempertahankan kemandirian ekonomi domestiknya serta meredupnya relevansi Spanyol di perekonomian Uni-Eropa <sup>32</sup>.

Globalisasi merubah formasi struktur perekonomian internasional, kondisi pasar yang semakin bebas mempersulit negara untuk bertahan dengan sendirinya atau beralih pada sebuah bentuk perekonomian regionalisme <sup>33</sup>. Konflik pemisahan diri Catalunya menurut Roller dipicu oleh sebuah pendapat bahwa perekonomian Spanyol

---

<sup>31</sup> Brandon M. Boylan, "In Pursuit of Independence: the Political Economy of Catalonia's Secessionist Movement," *Nations and Nationalism* 21, no. 4 (2015): pp. 761-785, <https://doi.org/10.1111/nana.12121>, 779.

<sup>32</sup> Ruth Elisa Roller (University of London, 2000), 25.

<sup>33</sup> Ibid.

pusat sudah tidak bisa diandalkan, sehingga Catalunya berusaha untuk mendapatkan relasi langsung dengan Uni-Eropa tanpa perantaraan Spanyol<sup>34</sup>. Upaya Catalunya untuk memisahkan diri adalah upaya untuk menetapkan relevansi kekuatan Catalunya di panggung ekonomi Uni-Eropa, dengan tujuan menyerahkan regulasi ekonomi menjadi lebih regional dan bukan lagi mengikuti negara induk.

Melalui beberapa pemaparan literatur, dapat ditarik sebuah diskusi yang memperdebatkan apakah peranan etnis masih berperan penting dalam separatisme Catalunya, atau pergerakan tersebut sudah ditunggangi oleh kepentingan lain yaitu kesejahteraan ekonomi. penulis berargumen bahwa nasionalisme Catalunya adalah sebuah pergerakan unilateral yang ditunggangi oleh kepentingan lain.

Instrumentasi identitas etnis mempengaruhi masyarakat Catalan sehingga identitas sosial disebarkan melalui tindakan *bandwagon*. Agitasi Nasionalisme tersebut membutuhkan masyarakat Catalan akan kejadian yang terjadi di sekitarnya, fakta mengenai relasi antara Catalunya dan Spanyol cenderung dibesar-besarkan. Nyatanya kepailitan ekonomi bukanlah sebuah marginalisasi melainkan terjadi di seluruh Spanyol.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Setelah penjelasan beberapa literatur yang dijadikan acuan bagi penulis dalam merangkai penelitan ini, penulis akan menjabarkan beberapa teori dan konsep yang

---

<sup>34</sup> Ruth Elisa Roller (University of London, 2000), 25

akan dijadikan acuan perspektif dalam proses analisis. Dalam mengkaji kasus separatisme yang terjadi di Catalunya, penulis akan menulis dari perspektif negara Spanyol dalam menanggulangi ancaman separatisme tersebut, serta juga mengelaborasi di bagian justifikasi gerakan separatis Catalunya yang mengancam keamanan nasional dan integrasi nasional Spanyol.

Akan dimulai melalui penjelasan mengenai akar konflik Catalunya dan Spanyol yaitu Identitas. Dalam eksistensi suatu negara, salah satu hal yang terpenting adalah keberadaan warga negara sebagai sebuah konsep komunal yang menggolongkan individu pada suatu komunitas yang besar yaitu negara. Akan tetapi bagaimana individu memahami landasan sosiologis yang kemudian mengkonstruksi sebuah relasi suatu individu dengan individu lain dalam suatu negara, dan bagaimana individu tersebut memahami batas dari negara sebagai komunitas ? . Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperkenalkan sebuah konsep identitas sebagai ide yang mengkonstruksi relasi dan batasan psikologis individu pada suatu komunitas.

Untuk memahami identitas, tentu harus dipahami landasan konstruktifnya, relasinya dalam hubungan internasional telah diakomodasi oleh pandangan konstruktivis. Konstruktivisme menawarkan dua perspektif dalam pembentukan suatu identitas, yaitu perspektif konstruktivis kritis dan konstruktivis konvensional. Dalam perspektif konstruktivis kritis pada pembentukan identitas, mengutamakan

konstruksi sebuah identitas melalui media narasi<sup>35</sup>. Konstruktivis kritis berpendapat bahwa bagaimana individu dapat mengidentifikasi dirinya tergolong dalam suatu komunitas didasarkan pada peranan narasi, yang diakomodasi melalui mitos dan simbolisasi sejarah dalam perkembangan intelektualnya<sup>36</sup>.

Konstruktivis konvensional menawarkan perspektif lain dalam pembentukan identitas, bukan melalui narasi melainkan melalui interaksi. Konstruksi identitas konstruktivis konvensional dititikberatkan pada perilaku dan interaksi individu yang ada di dalam sebuah batas negara. Berbeda dengan konstruktivis kritis yang sangat menitikberatkan pada peranan instrument eksternal dalam membentuk persepsi identitas setiap individu, konstruktivis kritis memutarbalikan proses tersebut dan menjadikan individu sebagai aktor pembentuk identitas. Konstruktivis konvensional mengatakan bahwa identitas terbentuk dari pola perilaku dan kebiasaan individu yang secara perlahan mengakar secara natural pada individu membentuk identitas<sup>37</sup>.

Kedua perspektif memberikan sumbangsih dalam penjelasan konstruksi identitas dalam hubungan internasional. Identitas kemudian termanifestasi menjadi sebuah identitas komunal yang dikenal sebagai nasionalisme. Secara singkat nasionalisme adalah sebuah penanda ketergolongan individu dalam negara sebagai

---

<sup>35</sup> Zeynep Arkan, “‘Via Media’ vs. the Critical Path: Constructivism(s) and the Case of EU Identity,” *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace* 3, no. 2 (2014): pp. 21-21, <https://doi.org/10.20991/allazimuth.167325>, 26.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

bentuk komunitas besar, akan tetapi nasionalisme nyatanya lebih dari sebuah formalitas diferensiasi identitas. Nasionalisme tidak hanya sebuah penanda identitas, melainkan juga menjadi sebuah ideologi yang mendefinisikan pola pikir dan landasan perilaku individu yang tergolong dalam sebuah batasan negara <sup>38</sup>.

Pada definisi awal, nasionalisme dijelaskan dalam sebuah sifat yang menggeneralisir dan mempersepsikan bentuk komunitas yang homogen. Nasionalisme menjadi sebuah nomenklatur yang digunakan untuk menggeneralisir bentuk identitas untuk dipisahkan sesuai dengan batasan negara, tanpa mengetahui bahwa pembentukan sebuah negara didasarkan pada bentuk masyarakat yang plural. Dengan demikian Walker Connor melakukan redefinisi terhadap konsep nasionalisme, Connor menyatakan bahwa kondisi heterogen dalam pembentukan sebuah negara tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, diperkenalkan kedua identitas yang mengkonstruksi persepsi identitas terhadap nasionalisme, yaitu *civic identity* dan *ethnic identity*.

*Civic identity*, diperkenalkan sebagai sebuah identitas yang didasarkan pada sebuah formalitas struktural untuk mendefinisikan kewarganegaraan individu yang didefinisikan pada keberadaan pada suatu negara. *Civic identity* merupakan sebuah identitas yang dikonstruksi melalui menghubungkan dan menggeneralisir sebuah identitas untuk menghasilkan sebuah kesatuan homogen dari pertumbuhan sejarah yang heterogen <sup>39</sup>. Pada umumnya *civic identity* terbentuk secara sintesis, atau

---

<sup>38</sup> Kevin Harrison and Tony Boyd, "Understanding Political Ideas and Movements," 2018, <https://doi.org/10.7765/9781526137951>, 155.

<sup>39</sup> Ibid.

merupakan sesuatu yang diturunkan secara institutional demi kepentingan keutuhan negara.

*Ethnic Identity* disisi lain sangat bertolak belakang dengan *civic identity*, dimana *ethnic identity* lebih bersifat natural dan terbentuk melalui relasi keturunan individu dengan komunitas terdahulu<sup>40</sup>. Relasi antara individu dengan nenek moyang merupakan sebuah relasi yang hanya dapat didefinisikan secara personal dan tidak dapat dipaksakan. *Ethnic identity* merupakan bentuk sebuah identitas mikro yang menunjukkan sebuah heterogenitas dibalik homogenitas yang berusaha ditampilkan oleh negara.

Kehadiran *ethnic identity* kemudian membuat sebuah fenomena etnonasionalisme, yang terbukti memiliki sifat dasar untuk mempolarisasi dan kontradiktif dengan bentuk *civic identity* yang berpotensi untuk terjadinya elitisme dikalangan mayoritas. Pada kenyataannya manifestasi etnonasionalisme mendasari konflik identitas yang didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai konsep kebangsaan. Fenomena umum yang terjadi dalam konflik hubungan internasional adalah keberadaan pergerakan bangsa tanpa negara yang bersifat subversif pada keutuhan negara. Untuk memahami fenomena tersebut dibutuhkan pemahaman mengenai etnonasionalisme.

---

<sup>40</sup> Kevin Harrison and Tony Boyd, "Understanding Political Ideas and Movements," 2018, <https://doi.org/10.7765/9781526137951>, 155.

Etnonasionalisme merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan sebagai penurunan dari pandangan Primordialisme dalam menjelaskan identitas kebangsaan, yaitu merupakan pendekatan yang berargumen bahwa komponen pembentuk sebuah bangsa atau negara adalah komponen fundamentalnya yaitu identitas kultural<sup>41</sup>. Terbentuknya suatu bangsa adalah berdasarkan komponen primordial-nya yaitu simbolisasi legenda, sejarah, dan juga adat istiadat komunitas sebelumnya, dan keterikatan dan kecintaan individu terhadap komponen tersebut menciptakan nasionalisme yang dilandaskan identitas etnis<sup>42</sup>.

Dengan munculnya keterikatan individu dengan identitas etnis dalam pembentukan sebuah identitas sosial, ditemukan sebuah klasifikasi baru, yang menjelaskan dualisme nasionalisme dalam tiap individu, keterikatan individu pada identitas kenegaraan dan keterikatan individu pada identitas diluar kenegaraan yaitu etnonasionalisme.

Walker Connor merupakan yang pertama kali memperkenalkan kata 'etnonasionalisme', yang diawali dari klasifikasi nasionalisme menjadi dua nomenklatur yaitu nasionalisme kenegaraan atau *civic identity* dengan nasionalisme etnis atau *ethnic identity*. Connor berpednapat bahwa munculnya etnonasionalisme adalah produk dari pemaksaan homogenitas yang terjadi dalam pembentukan sebuah

---

<sup>41</sup> Anand Bajaj and Kumar Parag, "Ethno Nationalism: A Brieff Intriduction," *Contemporary Literary Review India* 4, no. 3 (August 2017): pp. 1-10, 3-4.

<sup>42</sup> Ibid.

negara , sehingga kedua nasionalisme tersebut saling bertolak belakang, akan tetapi keduanya berperan penting dalam pembentukan sebuah identitas sosial <sup>43</sup>.

Pandangan menjadi pembeda kedua nasionalisme tersebut adalah pada proses pembentukannya, nasionalisme kenegaraan diakui sebagai konstruksi dan penyeragaman yang diimplementasikan secara merata atau objektif, menciptakan pengakuan dan kesetiaan individu terhadap identitas yang terbentuk sintesis dari homogenisasi sebuah kondisi yang prular di suatu lingkup geografis <sup>44</sup>.

Sedangkan dengan mengenalkan konsep etnonasionalisme, merupakan sebuah nasionalisme yang diturunkan secara natural yang diturunkan melalui kesetiaan subjektif yang mengerucut pada satu etnis spesifik <sup>45</sup>. Etnonasionalisme dapat dikatakan sebuah konstruksi identitas yang personal dalam pembentukan identitas, yang dipicu dari keterikatan individu pada akarnya yang disampaikan melalui ingatan, adat, dan gaya komunikasi komunitas etnis terdahulu.

Dalam perspektif politik, Anthony D. Smith menyumbangkan pemikiran modern mengenai konstruksi etnonasionalisme sebagai latar belakang sebuah kelompok etnis untuk berkeinginan menjadi sebuah bangsa seutuhnya. Smith menjelaskan pembeda sebuah komunitas etnis dengan bangsa adalah kemampuan

---

<sup>43</sup> Anand Bajaj and Kumar Parag, "Ethno Nationalism: A Brief Introduction," *Contemporary Literary Review India* 4, no. 3 (August 2017): pp. 1-10, 3-4.

<sup>44</sup> Walker Connor, *Ethnonationalism: the Quest for Understanding* (Princeton, Nj: Princeton University Press, 1994).

<sup>45</sup> Ibid.

untuk mengimplementasikan hukum dan politik, dengan demikian dilakukan politisasi yang dilakukan oleh aktor elit politik dalam menerapkan pendekatan populisme sehingga mendekati massa komunitas tersebut melalui tindak mobilisasi masyarakat dengan suatu landasan ideologi nasionalisme etnis<sup>46</sup>.

Dengan demikian menunjukkan bahwa kemunculan nasionalisme etnis atau etnonasionalisme memunculkan kecenderungan komunitas tersebut untuk mengedepankan agenda yang memperjuangkan kebebasan untuk memerintah melalui otonomi atau pemisahan sepenuhnya<sup>47</sup>. Kecenderungan tersebut ditentukan dari seberapa liberal dan seberapa radikal nasionalisme tersebut diseminasikan ke sebuah kelompok identitas, dan untuk menentukan kecenderungan tersebut didasarkan pada proses politisasi dan mobilisasi agenda tersebut. Politisasi identitas dapat dijabarkan melalui sebuah tindakan populisme.

Populisme merupakan sebuah strategi politik yang agresif, yang merupakan strategi politik eksklusif dan tergolong unilateral. Populisme memiliki kecenderungan untuk berpihak pada sebuah kelompok identitas dan mempromosikan ideologi kultural yang konservatif, dan alam dasar populisme adalah pergerakan politik yang antagonis atau berperan sebagai anti-tesis dari bentuk pluralisme demokrasi<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford: Basil Blackwell, 1999), 154.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Andrés Velasco, "Populism and Identity Politics," *LSE Public Policy Review* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31389/lseppr.1>, 1029.

Proses populisme digerakan melalui sebuah kegiatan perlawanan terhadap suatu objek atau aktor politik, hal ini ditentukan oleh aktor pembentuk populisme atau yang dikenal dengan *populist*, dalam menggambarkan *enemy image* pada suatu objek politik. Aktor populist kemudian berperan sebagai aktor representatif sebuah kelompok identitas, dan membentuk mobilisasi melalui provokasi emosi untuk mencapai sebuah agenda yang berupaya untuk melawan aktor “musuh” tersebut <sup>49</sup>.

Kecenderungan subversi yang dimiliki oleh politik populisme berpotensi menimbulkan sudut pandang bias yang cenderung ekstrimis dan radikal. Dengan demikian manifestasi radikalisme sebuah pandangan kelompok identitas dalam sebuah negara berpotensi untuk berlabuh pada sebuah aksi separatisme dan menjadi ancaman kenegaraan yang perlu ditindak lanjuti.

Ancaman kenegaraan yang disebabkan oleh keberadaan nasionalisme radikal tentunya masih sangat abstrak, dengan demikian dibutuhkan akomodasi pemikiran yang mendefinisikan ancaman. Pada dasarnya, Barry Buzan mendefinisikan ancaman sebagai elemen eksternal yang memiliki relasi sebab akibat yang beresiko pada terancamnya *status quo* keamanan dan kesejahteraan negara <sup>50</sup>. Karakteristik sebuah ancaman memiliki karakteristik dan probabilitas yang tidak pasti, membentuk sebuah

---

<sup>49</sup> Andrés Velasco, “Populism and Identity Politics,” LSE Public Policy Review 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31389/lseppr.1>, 1029.

<sup>50</sup> Barry Buzan, *People, States & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (ECPR Press, 2007), 30.

konsep yang masih abu-abu mengenai ancaman. Satu hal yang pasti dari keberadaan ancaman adalah timbulnya distorsi atau tantangan pada keamanan nasional.

Ancaman tidak memiliki sebuah penjelasan yang definit dan general, dikarenakan terdapat perbedaan di setiap negara. Negara itu sendiri dalam disiplin ilmu hubungan internasional belum bisa didefinisikan dengan satu karakteristik yang eksak, dikarenakan satu negara dan negara lain memiliki tingkat perbedaan yang sangat tinggi. Perilaku, persepsi, dan tindak tanduk negara terhadap suatu isu beragam satu dengan yang lainnya, dengan demikian untuk mendefinisikan ancaman pada suatu negara diperlukan pandangan yang mengerucut pada negara tujuan dan menjadikannya objek yang diamankan.

Dalam menjadikan negara sebagai objek yang diamankan, perlu diketahui tentang elemen apa yang dilindungi oleh negara sehingga menjadikannya prioritas keamanan nasional. Setiap negara mendefinisikan keamanan nasional berbeda-beda, hal tersebut dibedakan melalui beberapa variabel, yaitu kapabilitas negara, kekuatan politik, budaya, hingga letak geografis<sup>51</sup>. Barry Buzan mengerucutkan definisi ancaman melalui penjabaran ide keamanan negara, yang mengklasifikasikan ancaman terhadap dua lapisan negara yaitu ancaman “Fisik” negara yang mencakup ancaman

---

<sup>51</sup> Barry Buzan, *People, States & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (ECPR Press, 2007), 74.

pada bentuk konkrit negara, dan ancaman kesatuan institusi negara yang merupakan ancaman pada warga negara dan aktor politik dan ekonomi negara<sup>52</sup>.

Bentuk ancaman yang dihasilkan separatisme Catalunya berdampak pada ancaman institusi negara yang dimana resiko akan ditujukan pada ancaman perubahan struktur politik, lebih spesifiknya adalah terdapat pandangan para pembuat keputusan bahwa separatisme Catalunya dapat merubah struktur pemerintahan yang berdampak pada legitimasi kepemimpinan dan demokrasi Spanyol. Ancaman dalam bentuk isu politik idealnya ditanggapi dengan perlawanan melalui kontestasi politik di masyarakat, akan tidak sesuai jika konflik separatisme tersebut ditanggapi dengan agresi militer sebagai salah satu respon realisme konvensional pada sebuah ancaman. Dengan demikian diperlukan fleksibilitas para pembuat keputusan untuk menyesuaikan proses dalam mendefinisikan ancaman dan diejawantahkan dalam penentuan sikap untuk melindungi keamanan nasional.

Dengan demikian ancaman separatisme ini akan diteliti menggunakan kacamata teori sekuritisasi yang merupakan salah satu teori utama yang muncul dari pergerakan mazhab Copenhagen. Sekuritisasi merupakan sebuah upaya mengkonstruksi sebuah ancaman dari sesuatu yang sebelumnya bukan berupa ancaman, secara singkat sekuritisasi merupakan sebuah politisasi dalam membentuk agenda keamanan. Mengaplikasikan sekuritisasi dalam menanggapi konflik identitas

---

<sup>52</sup> Barry Buzan, *People, States & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (ECPR Press, 2007), 74.

yang dilandaskan pada politisasi merupakan tindakan efektif, dikarenakan respon sekuritisasi merupakan tanggapan terhadap ancaman yang fleksibel dan mampu mengimitasi populisme akan tetapi dengan ukuran agregat.

Sekuritisasi ini pertama dikemukakan oleh Ole Waever, yang merupakan hasil buah pemikiran campuran dari Neo-Realisme dan juga konstruksi sosial milik Konstrutivisme. Ole Waever melandaskan berkembangnya teori sekuritisasi dari pemikir Neo-Realisme mengenai konsep keamanan dan peranan negara untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya melalui perspektif Johan Galtung yang memperkenalkan konsep keamanan negara yang tercermin dilandaskan pada keamanan individu, meliputi perlindungan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk berkembang, kebebasan, dan juga perlindungan identitas<sup>53</sup>.

Dilema keamanan yang berkembang paska perang dingin menimbulkan abstraksi pada konsep keamanan itu sendiri, salah satunya adalah perluasan jenis aktor yang mengancam<sup>54</sup>. Konsiderasi ancaman dalam teori realisme tradisional adalah ancaman dilema kekuasaan dalam rukun bernegara yang dapat diukur melalui kekuatan militer dan hegemoni aktor tersebut. Ole Waever memprakarsai konsep keamanan fleksibel, berupaya untuk mengakomodasi beragam pola ancaman baru yang tidak

---

<sup>53</sup> Ole Waever, et al. "Securitization and desecuritization". Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research, 1993.

<sup>54</sup> Barry Buzzan and Ole Waever. "Macrosecuritisation and security constellations": reconsidering scale in securitisation theory. *Review of international studies*, 2009, 253-276.

selalu menyangkut ancaman militer, terciptalah sebuah konsep yang dikenal dengan sekuritisasi.

Barry Buzan juga berkontribusi dalam terciptanya konsep keamanan baru ini melalui, pergeseran konsep keamanan tradisional yang sebelumnya menyangkut ketegangan militer di tatanan internasional, bergeser menjadi ancaman kesejahteraan ekonomi dan sosial<sup>55</sup>. Pertanyaan berikut adalah, bagaimana sekuritisasi dapat menyampaikan urgensi ancaman yang tergolong non-tradisional kepada warga negara yang belum menyadari akan hal tersebut.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai proses sekuritisasi, akan dijelaskan bahwa sekuritisasi merupakan sebuah konstruksi sebuah konsep ancaman melalui dua arah. Konstruksi keamanan tersebut berproses mulai dari pengambilan keputusan negara, yang mengartikulasikan sebuah ancaman kepada ruang publik yang dikenal sebagai *audience*, melalui suatu proses yang dinamakan *speech act*<sup>56</sup>. Menghasilkan sekuritisasi menjadi teori multifungsi yang cukup mengakomodasi dalam mengkategorikan ancaman tatanan internasional hingga.

Dengan konsep sekuritisasi dianggap bahwa keamanan selalu diawali dari ancaman pada fisik atau “tubuh” negara. Akan tetapi sekuritisasi juga dapat digunakan

---

<sup>55</sup> Barry Buzan and Ole Waever. “*Macrosecuritisation and security constellations*”: *reconsidering scale in securitisation theory*. *Review of international studies*, 2009, 253-276.

<sup>56</sup> Ole Waever, et al. “*Securitization and desecuritization*”. Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research, 1993.

untuk konstruksi keamanan berawal dari ancaman individu, yang kemudian ancaman individu tersebut bereskalasi menjadi sebuah ancaman nasional, membentuk sebuah probabilitas konstruksi ancaman dua arah, dari tubuh negara maupun dari individu sebagai penggerak dari negara tersebut<sup>57</sup>.

Pendekatan tersebut menghasilkan sebuah mekanisme defensif ampuh yang melibatkan pihak elit dan masyarakat dalam membentuk sebuah urgensi. Melihat konflik separatisme di Catalunya, terlihat sebuah pola terbentuknya sebuah urgensi yang harus diartikulasikan ke ruang publik yang didasarkan atas ancaman keberadaan gerakan tersebut mengancam keutuhan Spanyol sebagai kesatuan, diikuti dengan ancaman politik dan sosio-ekonomi.

Dalam menetapkan sebuah ancaman dibutuhkan penjabaran mengenai apa yang melandasi mobilisasi separatisme tersebut, dan ditemukan bahwa friksi konsep identitas adalah tulang punggung konflik tersebut. Pendekatan berikutnya adalah bagaimana konstruksi sebuah identitas dapat menyebabkan distorsi pada lingkungan suatu negara yang ditranslasikan dalam bentuk ancaman pemisahan diri. Untuk menjelaskan pembentukan identitas sesuai dengan fenomena yang terjadi, akan digunakan pendekatan konstruksi kesadaran identitas yang dititikberatkan pada peranan etnis dalam konstruksi tersebut, dengan demikian penulis akan mengkaji komponen tersebut melalui pendekatan pada konsep etno-nasionalisme.

---

<sup>57</sup> Barry Buzan, *People, States & Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (ECPR Press, 2007), 74.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan penulisan dengan metode kualitatif, yang dimana mengedepankan menggunakan konsep teori sebagai lensa dan juga reintreptasi informasi yang didapat melalui data yang beragam <sup>58</sup>. Kecocokan metode kualitatif dalam menjelaskan sebuah fenomenologi dalam kejadian sosial, serta kemudahan untuk mengintreptasi perolehan data dan mengelaborasinya menjadi sebuah konsep baru, menjadi landasan penulis memilih melaksanakan penelitian dengan metode kualitatif <sup>59</sup>. Spesifikasi eksplorasi dalam penggunaan teori sebagai pisau analisis dan instrument intreptasi merupakan keunggulan metode kualitatif dalam mengkasi sebuah studi kasus <sup>60</sup>.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dan juga penulisan karya ilmiah akan didasarkan pada eksplorasi dan intreptasi melalui sumber yang kredibel, yaitu berupa informasi melalui buku, jurnal, teks sejarah, dan juga berita. Dengan substansi yang sudah terspesifikasi melalui perumusan masalah dan pembatasan masalah.

---

<sup>58</sup> Umar Suryadi Bakry. "Metode Penelitian Hubungan Internasional." Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2016).

<sup>59</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc, 2018).

<sup>60</sup> Beverley Hancock, Elizabeth Ockleford, and Kate Windridge, "An Introduction to Qualitative Research," *The NIHR Research Design Service for Yorkshire & the Humber*, 2009, pp. 1-39.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam merancang karya tulis ini menyertakan empat bab dalam pembahasan karya ilmiah, penulis akan memaparkan sistematika sebagai kerangka pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan sebuah introduksi dan juga rancangan akan kerangka karya tulis, yang disampaikan melalui beberapa sub-bab, yang diawali dengan latar belakang masalah dan dilanjutkan dengan Identifikasi masalah, yang dimana digunakan untuk meng-elaborasi latar belakang, dilanjutkan dengan spesifikasi konten analisis melalui Rumusan Masalah, Pembatasan masalah, dan Pertanyaan Penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian berlanjut pada kajian literatur yang berkaitan dengan masalah yang telah di rumuskan, yang kemudian akan diakhiri dengan kerangka pemikiran sebagai landasan berjalannya analisis.

BAB II, merupakan bab dimana digunakan untuk elaborasi lebih dalam kasus yang ditujukan sebagai objek analisis, yaitu fenomena terbentuknya “Catalanisme” sebagai bentuk etnonasionalisme Catalunya. Bab ini akan terbagi menjadi tiga sub bab, sub-bab pertama akan menjelaskan konstruksi etno-nasionalisme masyarakat Catalan di abad pertengahan. Dilanjutkan dengan sub bab kedua yang menjelaskan pembentukan nasionalisme di pemerintahan Francissco Franco. Sub bab ketiga akan menjelaskan nasionalisme Catalunya yang timbul paska reformasi demokratis Spanyol 1978.

BAB III, merupakan bab analisis yang dimana akan diimplementasikan kerangka pemikiran dan teori, dan digunakan sebagai pisau analisis. Dikarenakan terdapat dua komponen utama dalam kerangka pemikiran, maka bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab. Sub-bab pertama akan menjelaskan latar konstruksi identitas Catalan yang akan di aplikasikan pendekatan konstruksi identitas etnis, besertakan penelitian populisme yang dilandaskan identitas etnis . Sub bab kedua adalah sebuah penjelasan perspektif Spanyol atas ancaman separatisme, yang dimana akan dijelaskan melalui konsep keamanan non-tradisional, dilanjutkan dengan teori pendekatan sekuritisasi terhadap ancaman sosial.

BAB IV, dalam bab ini merupakan akhir dari karya tulis, yang dimana akan ditutup dengan kesimpulan penulis dari hasil analisis atas data yang dihasilkan melalui dilaksanakannya penelitian, disertai dengan opini dan pendapat penulis mengenai objek kajian.